

BAB II

PENDAHULUAN

2.1 TINJAUAN TEORITIS

2.1.1 Teori Resource Based View (RBV)

Teori *Resource Based View* (RBV) menjelaskan bahwa keberhasilan dan keberlanjutan suatu usaha ditentukan oleh kemampuan internal pelaku usaha dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya secara efektif. Teori ini menekankan bahwa keunggulan bersaing yang berkelanjutan tidak hanya bergantung pada kondisi eksternal seperti pasar atau tingkat persaingan, tetapi lebih ditentukan oleh kualitas dan pengelolaan sumber daya internal yang dimiliki oleh usaha tersebut (Barney, 1991).

Dalam perspektif RBV, sumber daya dipandang sebagai aset strategis yang dapat menciptakan keunggulan bersaing apabila memiliki karakteristik VRIN yaitu *valuable, rare, inimitable, dan non-substitutable* (Ofori-Baafi & Opoku, 2024). Sumber daya yang bernilai mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas usaha, sumber daya yang langka tidak dimiliki oleh banyak pesaing, sumber daya yang sulit ditiru tidak mudah disalin oleh usaha lain, serta sumber daya yang tidak mudah digantikan tidak memiliki alternatif lain yang setara.

Pada konteks Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), sumber daya internal tidak terbatas pada aset fisik seperti modal dan peralatan produksi, tetapi juga mencakup sumber daya tidak berwujud, seperti pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan manajerial pelaku usaha. Literasi keuangan dan kemampuan mengakses layanan keuangan formal merupakan bagian dari sumber daya internal

yang bersifat strategis karena berperan langsung dalam pengambilan keputusan keuangan dan pengelolaan usaha (Hilmawati & Kusumaningtias, 2021).

Dengan demikian, RBV memberikan dasar teoritis yang kuat untuk menjelaskan bahwa *financial literacy* sebagai sumber daya pengetahuan dan *financial inclusion* sebagai akses terhadap sumber daya keuangan formal dapat menjadi faktor penting dalam mendukung keberlanjutan UMKM. UMKM yang mampu mengelola kedua sumber daya tersebut secara optimal memiliki peluang yang lebih besar untuk bertahan, berkembang, dan menjaga keberlangsungan usaha dalam jangka panjang, termasuk UMKM yang beroperasi di Kota Padang.

2.1.2 Sustainability Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

2.1.2.1 Definisi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu pilar utama dalam struktur perekonomian Indonesia. Keberadaan UMKM tidak hanya berfungsi sebagai penggerak aktivitas ekonomi masyarakat, tetapi juga berperan penting dalam pemerataan pendapatan, pengurangan tingkat pengangguran, serta penguatan ekonomi daerah. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai konsep UMKM menjadi landasan teoritis yang penting dalam penelitian yang mengkaji keberlanjutan usaha.

Secara konseptual, UMKM dipahami sebagai unit usaha produktif yang dijalankan oleh individu atau badan usaha dengan skala usaha relatif kecil serta struktur organisasi yang sederhana. Tri Wahyu Adi (2021) menjelaskan bahwa UMKM pada umumnya memiliki keterbatasan sumber daya, baik dari sisi permodalan, tenaga kerja, maupun teknologi, namun memiliki tingkat fleksibilitas

yang tinggi dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan bisnis. Fleksibilitas tersebut memungkinkan UMKM untuk tetap bertahan dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil, meskipun di sisi lain juga meningkatkan kerentanan terhadap risiko pengelolaan usaha.

Dari perspektif regulasi, pengertian UMKM di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Dalam perkembangannya, regulasi tersebut disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang bertujuan untuk menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif dan mendorong peningkatan daya saing UMKM. Implementasi lebih lanjut dari undang-undang tersebut dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 yang mengatur kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi serta UMKM.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, kriteria UMKM ditetapkan berdasarkan modal usaha atau hasil penjualan tahunan, dengan ketentuan sebagai berikut:

(1) Usaha Mikro merupakan usaha dengan modal usaha sampai dengan Rp1.000.000.000 atau memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan Rp2.000.000.000;

(2) Usaha Kecil merupakan usaha dengan modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000 sampai dengan Rp5.000.000.000 atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000 sampai dengan Rp15.000.000.000; dan

(3) Usaha Menengah merupakan usaha dengan modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000 sampai dengan Rp10.000.000.000 atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15.000.000.000 sampai dengan Rp50.000.000.000.

Penetapan kriteria terbaru tersebut menunjukkan adanya penyesuaian kebijakan pemerintah terhadap dinamika perkembangan UMKM. Dalam konteks penelitian ini, definisi UMKM menjadi dasar penting untuk mengidentifikasi karakteristik responden penelitian, khususnya UMKM mikro di Kota Padang yang menjadi objek kajian.

2.1.2.2 Karakteristik Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki karakteristik yang berbeda dengan usaha skala besar, terutama dari sisi skala usaha, pengelolaan, dan akses terhadap sumber daya. UMKM umumnya dikelola langsung oleh pemilik usaha dengan struktur organisasi yang sederhana, sehingga pengambilan keputusan bersifat terpusat. Kondisi ini memberikan fleksibilitas dalam operasional usaha, namun di sisi lain meningkatkan ketergantungan terhadap kemampuan manajerial dan pengetahuan pemilik usaha dalam mengelola bisnis.

Karakteristik lain yang menonjol pada UMKM adalah keterbatasan permodalan, rendahnya pencatatan keuangan, serta belum optimalnya pemisahan antara keuangan usaha dan keuangan pribadi. Selain itu, sebagian besar UMKM memiliki akses yang terbatas terhadap lembaga keuangan formal dan masih bergantung pada pasar lokal. Keterbatasan tersebut menunjukkan bahwa kemampuan internal pelaku usaha, khususnya literasi keuangan serta akses

terhadap layanan keuangan formal, menjadi faktor penting dalam mendukung keberlanjutan UMKM.

2.1.2.3 Definisi *Sustainability* Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Keberlanjutan usaha (*business sustainability*) merupakan kondisi ketika UMKM mampu mempertahankan operasional, mengembangkan bisnis, serta memenuhi kebutuhan ekonomi secara terus-menerus (Nduru et al., 2025). Keberlanjutan usaha dapat dilihat dari kemampuan inovasi, kesejahteraan karyawan dan pelanggan, serta pencapaian indikator finansial seperti *return on equity* (Hilmawati & Kusumaningtias, 2021). Keberlanjutan usaha menggambarkan kemampuan UMKM mempertahankan operasi, meningkatkan produktivitas, dan mencapai pendapatan secara berkesinambungan dari waktu ke waktu.

2.1.3 Financial Inclusion (Inklusi Keuangan)

2.1.3.1 Definisi *Financial Inclusion*

Financial inclusion (inklusi keuangan) adalah kondisi di mana seluruh lapisan masyarakat, termasuk pelaku UMKM, memiliki akses yang mudah, terjangkau, dan berkelanjutan terhadap berbagai layanan keuangan formal (Nduru et al., 2025). Inklusi keuangan mencerminkan keterjangkauan masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan seperti tabungan, pembiayaan, sistem pembayaran, serta layanan keuangan digital yang aman dan efisien.

Menurut Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI), inklusi keuangan didefinisikan sebagai kondisi ketika setiap anggota masyarakat memiliki akses terhadap berbagai layanan keuangan formal yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing. Definisi ini menegaskan bahwa inklusi

keuangan berorientasi pada pemerataan akses, bukan semata-mata pada peningkatan jumlah lembaga keuangan.

Holle dan Shalihah (2023) menjelaskan bahwa inklusi keuangan merupakan instrumen strategis dalam pembangunan ekonomi karena mampu mendorong aktivitas ekonomi produktif, memperluas kesempatan usaha, serta mengurangi ketimpangan ekonomi. Dalam konteks UMKM, inklusi keuangan menjadi jembatan penting bagi pelaku usaha untuk memperoleh sumber permodalan, layanan pembayaran, serta produk keuangan lain yang mendukung keberlangsungan usaha.

2.1.3.2 Indikator *Financial Inclusion*

Pengukuran inklusi keuangan dalam penelitian UMKM umumnya mengacu pada beberapa indikator utama yang relevan dengan aktivitas usaha. Berdasarkan kajian Holle dan Shalihah (2023) serta penelitian Hilmawati dan Kusumaningtias (2021), indikator inklusi keuangan yang sering digunakan meliputi:

- 1) **Akses (*Access*)**, yaitu kemampuan pelaku UMKM dalam menjangkau lembaga keuangan formal, seperti bank, koperasi, maupun lembaga keuangan mikro. Akses ini tercermin dari kepemilikan rekening, jarak ke lembaga keuangan, serta kemudahan prosedur pembukaan rekening.
- 2) **Penggunaan (*Usage*)**, yang menunjukkan intensitas dan keberlanjutan penggunaan layanan keuangan formal, seperti penggunaan rekening untuk transaksi usaha, pemanfaatan kredit usaha, serta penggunaan layanan pembayaran non-tunai.

3) **Kualitas Layanan (*Quality*)**, yang berkaitan dengan kesesuaian produk keuangan dengan kebutuhan UMKM, transparansi informasi, serta perlindungan konsumen.

Indikator-indikator tersebut mencerminkan bahwa inklusi keuangan tidak hanya diukur dari keberadaan rekening bank, tetapi juga dari sejauh mana layanan keuangan benar-benar dimanfaatkan untuk mendukung aktivitas usaha.

2.1.3.3 Peran *Financial Inclusion* terhadap UMKM

Inklusi keuangan memiliki peran strategis dalam mendukung keberlanjutan UMKM. Akses yang memadai terhadap layanan keuangan formal memungkinkan pelaku UMKM memperoleh modal usaha, mengelola arus kas dengan lebih baik, serta meningkatkan kapasitas produksi. Wahyuni et al., (2025) menunjukkan bahwa inklusi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap *sustainability* UMKM karena memudahkan pelaku usaha dalam memperoleh pembiayaan dan mengelola risiko keuangan.

Selain itu, inklusi keuangan juga berkontribusi pada peningkatan efisiensi operasional UMKM melalui penggunaan layanan pembayaran digital dan produk keuangan lainnya. Hilmawati dan Kusumaningtias (2021) menekankan bahwa meskipun hasil penelitian terkait pengaruh inklusi keuangan terhadap keberlanjutan UMKM masih beragam, inklusi keuangan tetap menjadi prasyarat penting bagi penguatan struktur keuangan UMKM.

Dalam konteks Kota Padang, inklusi keuangan berperan sebagai sarana pendukung bagi UMKM untuk bertahan dan berkembang di tengah persaingan

usaha yang semakin ketat. Kemudahan akses pembiayaan dan layanan keuangan formal diharapkan mampu memperkuat daya tahan UMKM dalam jangka panjang.

2.1.4 *Financial Literacy* (Literasi Keuangan)

2.1.4.1 Definisi *Financial Literacy*

Financial literacy (literasi keuangan) merupakan kemampuan individu dalam memahami, mengelola, dan mengambil keputusan keuangan secara tepat yang didukung oleh pengetahuan, keterampilan, serta keyakinan dalam mengelola sumber daya keuangan (Nduru et al., 2025). Literasi keuangan mencakup pemahaman terhadap konsep keuangan dasar, kemampuan mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam praktik pengelolaan keuangan usaha, serta sikap dan perilaku keuangan yang bijak guna mencapai kesejahteraan dan keberlanjutan finansial. OECD mendefinisikan literasi keuangan sebagai kombinasi antara pemahaman konseptual, kemampuan mengelola keuangan, sikap, serta tindakan dalam membuat keputusan keuangan yang tepat dan bertanggung jawab (Hilmawati & Kusumaningtias, (2021).

Choerudin et al., (2023) mendefinisikan literasi keuangan sebagai kombinasi antara pengetahuan keuangan, keterampilan pengelolaan, dan kepercayaan diri dalam menggunakan produk serta layanan keuangan. Otoritas Jasa Keuangan juga menekankan bahwa literasi keuangan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan keuangan masyarakat. Bagi pelaku UMKM, literasi keuangan menjadi fondasi penting dalam menjalankan usaha karena berkaitan langsung dengan kemampuan menyusun perencanaan keuangan, mengelola arus kas, serta mengevaluasi kinerja usaha.

2.1.4.2 Indikator *Financial Literacy*

Indikator literasi keuangan dalam penelitian UMKM umumnya disesuaikan dengan kebutuhan pengelolaan usaha. Menurut Monica, N & Ruzikna, R (dalam Susanti et al., 2025), indikator literasi keuangan meliputi:

- 1) Pengetahuan Keuangan (*Financial Knowledge*)**, yaitu pemahaman mengenai konsep dasar keuangan seperti pencatatan keuangan, bunga, inflasi, serta produk keuangan.
- 2) Perilaku Keuangan (*Financial Behavior*)**, yang terlihat dari praktik pengelolaan keuangan usaha, seperti pemisahan keuangan pribadi dan usaha, penyusunan anggaran, serta kebiasaan menabung dan berinvestasi.
- 3) Sikap Keuangan (*Financial Attitudes*)**, yang mencerminkan pola pikir dan kesadaran pelaku UMKM terhadap pentingnya perencanaan dan pengelolaan keuangan.

Indikator-indikator tersebut menggambarkan bahwa literasi keuangan tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan teoritis, tetapi juga tercermin dalam perilaku keuangan sehari-hari.

2.1.4.3 Pengaruh *Financial Literacy* terhadap Pengelolaan UMKM

Literasi keuangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas pengelolaan UMKM. Pelaku usaha dengan tingkat literasi keuangan yang baik cenderung mampu mengelola keuangan usaha secara lebih terstruktur, membuat keputusan investasi yang rasional, serta mengantisipasi risiko keuangan.

Pratiwi et al., (2025) menemukan bahwa literasi keuangan berpengaruh positif terhadap *sustainability* UMKM karena meningkatkan kemampuan pelaku

usaha dalam mengelola keuangan dan mempertahankan kelangsungan usaha. Temuan serupa juga disampaikan oleh Hilmawati dan Kusumaningtias (2021), yang menyatakan bahwa literasi keuangan merupakan faktor kunci dalam meningkatkan kinerja dan keberlangsungan UMKM.

Dalam konteks UMKM di Kota Padang, literasi keuangan menjadi aspek krusial mengingat masih banyak pelaku usaha yang belum menerapkan pencatatan keuangan secara memadai. Peningkatan literasi keuangan diharapkan mampu memperkuat pengelolaan usaha dan mendukung *sustainability* UMKM secara berkelanjutan.

2.1.5 Keterkaitan *Financial Inclusion* dan *Financial Literacy* terhadap *Sustainability* UMKM

Financial inclusion dan *financial literacy* merupakan dua konsep yang saling melengkapi dalam mendukung keberlanjutan UMKM. Inklusi keuangan menyediakan akses terhadap layanan keuangan, sementara literasi keuangan memastikan bahwa layanan tersebut dimanfaatkan secara optimal.

Berdasarkan perspektif *Resource Based View* (RBV), literasi keuangan dapat dipandang sebagai sumber daya tidak berwujud yang bernilai strategis, sedangkan inklusi keuangan berfungsi sebagai sarana pendukung eksternal. Kombinasi keduanya diharapkan mampu memperkuat kapasitas UMKM dalam mencapai *sustainability* usaha, khususnya di Kota Padang.

2.2 TINJAUAN PENELITIAN TERDAHULU

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Tahun	Hasil Penelitian
1.	Aliah Pratiwi, Nurul Huda, Reza Muhammad Rizqi	Pengaruh <i>Financial Literacy, Digital Literacy, dan Accounting Mental Terhadap Sustainability UMKM</i>	2025	<i>Financial literacy dan accounting mental</i> berpengaruh signifikan terhadap <i>sustainability</i> UMKM, sedangkan <i>digital literacy</i> tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap <i>sustainability</i> UMKM
2.	Ni Nyoman Ari Wahyuni, I Putu Deddy Samtika Putra, & Ni Putu Yeni Yuliantari	Pengaruh Literasi Keuangan, Inklusi Keuangan, dan Modal Usaha terhadap Keberlanjutan	2025	Semua variabel independen yaitu literasi keuangan, inklusi keuangan, dan modal usaha berpengaruh positif dan signifikan

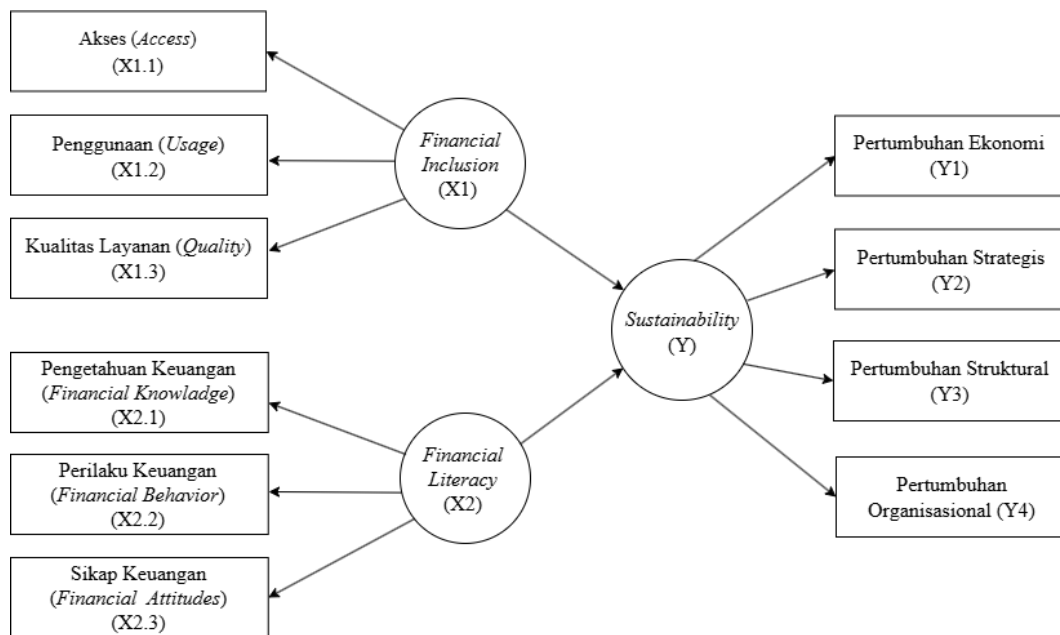
		UMKM di Kabupaten Karangasem		terhadap keberlanjutan UMKM.
3.	Methodist Putra Jaya Ndruru, Rafida Khairani, Jekson Simatupang, Maya Andriani	Pengaruh <i>Financial Literacy</i> dan <i>Financial Technology</i> terhadap <i>Sustainability</i> UMKM di Medan Petisah	2025	<i>Financial literacy</i> dan <i>Financial technology</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>sustainability</i> UMKM. Kedua variabel secara simultan juga berpengaruh signifikan.
4.	Rahmi Nofra Syamanda & Elsa Meirina	Pengaruh Inklusi Keuangan, Literasi Keuangan dan Akses Permodalan terhadap Keberlanjutan	2025	Inklusi keuangan, dan Literasi keuangan berpengaruh signifikan terhadap keberlanjutan UMKM. Akses permodalan tidak

		UMKM Sektor Kuliner di Kecamatan Padang Barat Kota Padang		berpengaruh signifikan terhadap keberlanjutan UMKM.
5.	Lisa Susanti, Sari Nuzullina Ramadhani, Shabrina Tri Astri Nasution	Pengaruh <i>Financial Technology</i> dan Literasi Keuangan terhadap Keberlangsungan UMKM di Kecamatan Medan Sunggal	2025	<i>Financial technology</i> dan literasi keuangan secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap keberlangsungan UMKM.
6.	Rika Desiyanti, Chrismondari, Adnan Raja Romero	Pengaruh Literasi Keuangan dan Pengelolaan Keuangan Terhadap Kinerja dan Keberlangsungan	2023	Literasi keuangan dan Pengelolaan keuangan berpengaruh positif terhadap Kinerja UMKM dan Keberlangsungan UMKM.

		UMKM di Kota Padang		
7.	Muhammad Adli Azro'i, Nurbaiti, & Muhammad Ikhsan Harahap	Pengaruh Inklusi Keuangan dan Modal terhadap <i>Sustainability</i> UMKM dengan Prinsip Maqashid Syariah (Studi Kasus UMKM Kota Medan)	2023	Penelitian menunjukkan bahwa inklusi keuangan dan modal berpengaruh signifikan, baik secara parsial maupun simultan, terhadap <i>sustainability</i> UMKM dengan nilai signifikansi < 0,05.
8.	Mei Ruli Ninin Hilmawati & Rohmawati Kusumaningtias	Inklusi Keuangan dan Literasi Keuangan terhadap Kinerja dan Keberlangsungan Sektor UMKM	2021	Literasi keuangan berpengaruh terhadap kinerja dan keberlangsungan UMKM. Sedangkan Inklusi keuangan tidak berpengaruh terhadap kinerja dan keberlangsungan UMKM.

1.3 KERANGKA PIKIR

Gambar 2. 1 Kerangka Pikiran



Variabel *financial inclusion* dalam penelitian ini diposisikan sebagai variabel independen pertama (X1). *Financial inclusion* mencerminkan sejauh mana pelaku UMKM memiliki akses dan kemampuan untuk memanfaatkan layanan keuangan formal. Dalam kerangka penelitian ini, *financial inclusion* diukur melalui beberapa indikator, yaitu akses layanan keuangan, penggunaan layanan keuangan, serta kemudahan dan keberlanjutan akses. Akses layanan keuangan menunjukkan keterjangkauan pelaku UMKM terhadap lembaga dan produk keuangan formal. Penggunaan layanan keuangan menggambarkan intensitas pemanfaatan produk keuangan dalam aktivitas usaha, sedangkan kemudahan dan keberlanjutan akses merefleksikan kontinuitas serta kenyamanan pelaku UMKM dalam mengakses

layanan tersebut. Tingkat *financial inclusion* yang baik diharapkan dapat memperkuat kapasitas usaha UMKM dan mendukung keberlanjutan usaha dalam jangka panjang.

Selain *financial inclusion*, penelitian ini juga memasukkan *financial literacy* sebagai variabel independen kedua (X2). *Financial literacy* mengacu pada tingkat pemahaman dan kemampuan pelaku UMKM dalam mengelola keuangan usaha secara rasional dan bertanggung jawab. Variabel ini diukur melalui indikator pengetahuan keuangan, perilaku keuangan, dan sikap keuangan. Pengetahuan keuangan berkaitan dengan pemahaman pelaku UMKM terhadap konsep dasar keuangan, perilaku keuangan mencerminkan cara pengambilan keputusan keuangan dalam kegiatan usaha, sedangkan sikap keuangan menunjukkan pandangan dan kecenderungan pelaku UMKM terhadap pengelolaan keuangan. *Financial literacy* yang baik diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengelolaan usaha, mengurangi risiko keuangan, dan pada akhirnya mendorong keberlanjutan UMKM.

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *sustainability* UMKM (Y), yang menggambarkan kemampuan usaha untuk bertahan dan berkembang secara berkelanjutan. *Sustainability* UMKM diukur melalui indikator pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan strategis, pertumbuhan struktural, dan pertumbuhan organisasional. Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan peningkatan kinerja finansial usaha, pertumbuhan strategis mencerminkan kemampuan UMKM dalam menyusun dan menerapkan strategi usaha, pertumbuhan struktural menunjukkan perkembangan sistem dan tata kelola usaha, sedangkan pertumbuhan organisasional

berkaitan dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan manajemen usaha.

Hubungan antara *financial inclusion* dan *financial literacy* terhadap *sustainability* UMKM dianalisis menggunakan metode ***Structural Equation Modeling–Partial Least Squares (SEM-PLS)***. Metode ini dipilih karena mampu menganalisis hubungan laten antar variabel secara simultan serta sesuai digunakan pada penelitian dengan model yang bersifat prediktif dan indikator yang bersifat reflektif maupun formatif. Melalui SEM-PLS, penelitian ini tidak hanya menguji pengaruh langsung masing-masing variabel independen terhadap *sustainability* UMKM, tetapi juga menilai kekuatan kontribusi setiap indikator dalam membentuk konstruk penelitian.

1.4 HIPOTESIS

2.4.1 Pengaruh *Financial Inclusion* terhadap *Sustainability* UMKM

Keberlanjutan (*sustainability*) UMKM mencerminkan kemampuan usaha dalam mempertahankan eksistensi, meningkatkan kinerja usaha, serta beradaptasi terhadap dinamika lingkungan bisnis dalam jangka panjang. Keberlanjutan ini tidak hanya ditentukan oleh kemampuan produksi dan pemasaran, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kemampuan pelaku UMKM dalam mengakses dan memanfaatkan sumber daya keuangan secara efektif. Salah satu faktor yang berperan penting dalam konteks tersebut adalah *financial inclusion*. *Financial inclusion* didefinisikan sebagai ketersediaan dan kemudahan akses pelaku usaha terhadap lembaga, produk, dan layanan jasa keuangan formal yang sesuai dengan kebutuhan

dan kemampuan pengguna. Bagi UMKM, inklusi keuangan menjadi sarana strategis untuk memperoleh pembiayaan usaha, mengelola arus kas, serta mendukung pengambilan keputusan keuangan yang lebih terencana. Tanpa akses keuangan yang memadai, UMKM cenderung menghadapi keterbatasan modal, kesulitan ekspansi usaha, dan tingginya risiko ketidakberlanjutan usaha.

Hubungan antara inklusi keuangan dan keberlanjutan UMKM dapat dijelaskan melalui *Resource Based View* (RBV), yang menyatakan bahwa keunggulan dan keberlanjutan usaha ditentukan oleh kemampuan pelaku usaha dalam mengakses dan mengelola sumber daya yang bernilai dan strategis. Akses terhadap layanan keuangan formal merupakan salah satu sumber daya penting yang memungkinkan UMKM meningkatkan kapasitas produksi, menjaga stabilitas keuangan, serta memperkuat daya saing usaha secara berkelanjutan. Secara empiris, pengaruh inklusi keuangan terhadap keberlanjutan UMKM telah dibuktikan dalam berbagai penelitian. Penelitian oleh Azro'i et al., (2023) menunjukkan bahwa inklusi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap *sustainability* UMKM. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin mudah UMKM mengakses layanan keuangan, semakin besar peluang usaha untuk bertahan dan berkembang dalam jangka panjang.

Hasil serupa juga ditemukan oleh Wahyuni et al., (2025) yang menyatakan bahwa inklusi keuangan berpengaruh signifikan terhadap keberlanjutan UMKM di Kabupaten Karangasem. Akses terhadap pembiayaan dan layanan keuangan formal membantu pelaku UMKM dalam memenuhi kebutuhan modal usaha serta menjaga kelangsungan operasional usaha secara berkelanjutan. Lebih lanjut, penelitian

Syamanda dan Meirina (2025) yang dilakukan pada UMKM sektor kuliner di Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, memperkuat temuan tersebut dengan menunjukkan bahwa inklusi keuangan memiliki pengaruh signifikan terhadap keberlanjutan UMKM. Hal ini menegaskan bahwa dalam konteks UMKM di Kota Padang, kemudahan akses terhadap layanan keuangan formal menjadi faktor penting dalam menjaga kelangsungan dan stabilitas usaha di tengah persaingan yang semakin ketat.

Dengan demikian, inklusi keuangan tidak hanya berperan sebagai sarana pendukung permodalan, tetapi juga sebagai faktor strategis yang mendorong UMKM untuk bertahan, berkembang, dan berkelanjutan. Semakin tinggi tingkat inklusi keuangan yang dimiliki pelaku UMKM, semakin besar pula kemampuan usaha dalam menjaga keberlanjutan jangka panjangnya. Berdasarkan uraian teoritis dan temuan empiris tersebut, maka hipotesis penelitian yang dirumuskan adalah:

H1: *Financial Inclusion* berpengaruh signifikan terhadap *Sustainability* UMKM.

2.4.2 Pengaruh Financial Literacy terhadap Sustainability UMKM

Keberlanjutan (*sustainability*) UMKM merupakan kondisi di mana suatu usaha mampu mempertahankan kelangsungan operasionalnya serta berkembang secara berkesinambungan dalam jangka panjang. Keberlanjutan ini tidak hanya dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti kondisi pasar dan persaingan usaha, tetapi juga sangat ditentukan oleh kemampuan internal pelaku UMKM dalam mengelola usahanya secara efektif. Salah satu aspek internal yang memiliki peran penting dalam mendukung keberlanjutan UMKM adalah *financial literacy* atau literasi

keuangan. Literasi keuangan dapat dipahami sebagai tingkat pemahaman, pengetahuan, serta kemampuan pelaku usaha dalam mengelola keuangan usaha, termasuk dalam perencanaan, pencatatan, pengendalian, dan pengambilan keputusan keuangan. Pelaku UMKM yang memiliki literasi keuangan yang baik cenderung lebih mampu mengelola arus kas, mengalokasikan modal secara efisien, serta mengantisipasi risiko keuangan yang dapat mengancam kelangsungan usaha. Sebaliknya, keterbatasan literasi keuangan sering kali menyebabkan kesalahan pengelolaan keuangan yang berdampak pada ketidakstabilan usaha.

Secara teoritis, hubungan antara literasi keuangan dan keberlanjutan UMKM dapat dijelaskan melalui pendekatan *Resource Based View* (RBV). Teori ini menyatakan bahwa keberlanjutan usaha ditentukan oleh kemampuan pelaku usaha dalam mengelola sumber daya internal yang bersifat strategis. Literasi keuangan merupakan salah satu sumber daya tidak berwujud yang penting karena berperan dalam meningkatkan kualitas pengambilan keputusan keuangan, efisiensi pengelolaan usaha, serta kemampuan UMKM dalam mempertahankan eksistensinya dalam jangka panjang. Hasil penelitian empiris menunjukkan bahwa literasi keuangan memiliki peran dalam mendukung keberlanjutan UMKM. Penelitian yang dilakukan oleh Azro'i et al., (2023) membuktikan bahwa literasi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap sustainability UMKM. Temuan ini menunjukkan bahwa pelaku usaha yang memiliki pemahaman keuangan yang memadai cenderung lebih mampu menjaga kelangsungan usahanya dan menghadapi ketidakpastian ekonomi.

Penelitian lain oleh Wahyuni et al., (2025) juga menemukan bahwa literasi keuangan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap keberlanjutan UMKM. Pemahaman keuangan yang baik membantu pelaku usaha dalam mengelola kewajiban keuangan serta menjaga stabilitas usaha dalam jangka panjang. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa literasi keuangan merupakan faktor penting dalam menjaga keberlanjutan UMKM. Selain itu, penelitian Syamanda dan Meirina (2025) yang dilakukan pada UMKM di Kota Padang menunjukkan bahwa kemampuan pengelolaan keuangan pelaku UMKM memiliki keterkaitan dengan keberlangsungan usaha. Meskipun penelitian tersebut lebih berfokus pada kinerja UMKM, aspek literasi keuangan tetap menjadi dasar dalam menjaga kesinambungan usaha, khususnya pada UMKM yang beroperasi di wilayah perkotaan dengan tingkat persaingan yang tinggi.

Berdasarkan perbedaan hasil penelitian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa literasi keuangan cenderung memiliki pengaruh yang lebih kuat terhadap keberlanjutan UMKM dibandingkan terhadap kinerja usaha dalam jangka pendek. Literasi keuangan memungkinkan pelaku UMKM untuk merencanakan usaha secara lebih matang, mengelola risiko keuangan, serta mempertahankan kelangsungan usaha dalam jangka panjang. Dengan demikian, berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H2: *Financial Literacy* berpengaruh signifikan terhadap *Sustainability* UMKM.